

Peran Media Daring pada Konflik Sumber Daya Alam di Riau

M Rawa El Amady

Perkumpulan Scale Up

Jalan Rajawali Sakti, Komplek Vila Garuda Mas A3, Pekanbaru, Riau 28292

mrawaelamady@gmail.com

DOI: 10.24002/jik.v19i2, Desember.3692

Submitted: September 2020

Reviewed: January 2021

Accepted: October 2022

Abstract: *This article discusses the role of online media in natural resource conflicts in Riau during 2016-2018. The conflict has always been at national highest position, even though there are 323 online media that should be able to accelerate conflict resolution. The research is conducted using qualitative content analysis with data from the annual report on conflict news in 2016-2018, and analyzed based on news content and media trends. The findings show that online media plays a function of conflict diminisher for economic interests. In the process, there are parties involved, namely investors, local communities, media, and the government.*

Keywords: *conflict diminisher, natural resources conflict, online media*

Abstrak: *Artikel ini mendiskusikan tentang peran media daring pada konflik sumber daya alam (SDA) di Riau tahun 2016-2018. Konflik di Riau selalu berada pada posisi tertinggi nasional, meskipun di Riau terdapat 323 media daring yang seharusnya mempercepat penyelesaian konflik. Penelitian dilaksanakan dengan metode analisis isi kualitatif, data diperoleh dari laporan tahunan berita konflik tahun 2016-2018. Data dianalisis berdasarkan isi pemberitaan dan kecenderungan media tentang konflik SDA. Temuan penelitian menunjukkan bahwa media daring di Riau memerankan fungsi conflict diminisher (menenggelamkan isu konflik) untuk kepentingan ekonomi. Pada prosesnya, terdapat pihak yang terlibat, yakni pemodal, masyarakat setempat, media, dan pemerintah.*

Kata Kunci: *konflik sumber daya alam, media daring, penenggelaman isu konflik*

Konflik sumber daya alam (SDA) di Riau sejak tahun 2003-2018 selalu berada pada tingkat teratas secara nasional (Anggoro, 2020). Laporan riset media Perkumpulan *Scale Up* menunjukkan bahwa di tahun 2018 terdapat 42 konflik, terdiri atas 26 kasus baru dan 13 kasus lama yang pernah terjadi berulang pada tahun 2018. Konflik di Riau masih tertinggi dibandingkan sembilan provinsi lain, yaitu Jawa Timur dengan 35 kasus, Sumatera Selatan dengan 28 kasus, Jawa Barat dengan 28 kasus, Lampung dengan 26 kasus, Sumatera Utara

dengan 23 kasus, Banten dengan 22 kasus, Aceh dengan 21 kasus, Kalimantan Tengah dengan 17 kasus, dan DKI Jakarta dengan 17 kasus (Amady, 2021, h. 13-14).

Konflik SDA melibatkan beragam pemangku kepentingan karena ruang lingkup konflik yang besar. Para pemangku kepentingan tidak jarang memanfaatkan media massa untuk membangun opini publik untuk mempercepat proses penyelesaian konflik (Julham, 2018, h. 54). Media berperan menyediakan saluran komunikasi dan akses yang terbuka ke

berbagai aktor yang terlibat dalam konflik SDA. Harapannya, penyelesaian konflik SDA dapat dipercepat dengan kehadiran media massa (Kleinschmit, 2012, h. 74). Pada konteks konflik SDA di Riau, jumlah media massa mencapai 323 media daring atau 1 persen dari media daring nasional yang mencapai 43.300 dan 66 media cetak (Komala, 2017, h. 8). Secara logis, seharusnya jumlah media daring tersebut mampu mendorong percepatan penyelesaian konflik SDA di Riau. Secara faktual, pemberitaan konflik di Riau pada tahun 2016-2018 berjumlah 186 berita yang disiarkan oleh 99 media daring, sementara jumlah media daring lokal di Riau berjumlah 323 media daring. Amady (2019, h. 23) menjelaskan bahwa media daring di Riau umumnya hanya satu kali memberitakan konflik SDA dan hanya 32 media yang memberitakan lebih dari satu kali. Secara umum, media daring di Riau menampilkan pemberitaan bahwa masyarakat merupakan aktor konflik yang berperan menaikkan eskalasi konflik. Selain itu, pemberitaan media daring di Riau belum mampu mendorong pemerintah untuk menjadikan konflik masuk ke ranah kebijakan.

Kondisi di atas kuat hubungannya dengan profesionalisme media daring di Indonesia, khususnya di Riau. Berdasarkan pemaparan Dewan Pers bahwa dari 43.000 media hanya 4 persen saja yang profesional (Komala, 2017, h. 8). Syahnan Rangkuti (wartawan senior *Kompas*, wawancara, 24 April 2019) menuturkan bahwa persentase profesionalitas dari media daring Riau lebih

rendah dibanding media nasional, yaitu tidak lebih 1,5 persen dari 323 media. Selebihnya, media daring lokal di Riau menuliskan berita tanpa memenuhi kaidah jurnalistik dan cenderung menjadi alat ekonomi baik melalui berita maupun iklan. Media daring yang tidak profesional memproduksi berita yang tidak proporsional. Hal ini berdampak buruk pada perjuangan masyarakat korban konflik SDA. Media menjadi alat untuk mengembalikan investasi melalui kebijakan redaksional dan iklan, sehingga mengganggu prinsip independensi media di hadapan khalayak. Sikap tidak profesional dan proporsional media daring di Riau sangat terlihat dari terbatasnya jumlah produksi berita terkait konflik SDA dan beritanya pun tidak berkelanjutan.

Sari, Widyaningyun, dan Widiyarta (2021, h. 137) menjelaskan bahwa media seharusnya bertindak sebagai sahabat masyarakat dengan menyampaikan pemberitaan yang konstruktif terkait konflik SDA. Pemberitaan konstruktif tersebut sangat dibutuhkan guna mempercepat penyelesaian konflik yang adil dan setara. Media sebagai salah satu pilar demokrasi seharusnya ikut berperan mempercepat penyelesaian konflik melalui kekuatan pemberitaannya.

Hal berbeda dijelaskan oleh Nandang (2021, h. 15) yang berdasarkan pengamatannya terhadap berbagai peristiwa konflik di Indonesia menyatakan bahwa peran media banyak dikaburkan oleh institusi media itu sendiri. Media massa lebih mementingkan tujuan ekonomi dengan memilih judul berita bernilai jual

tinggi, serta tujuan ideologi. Pendapat ini diperkuat laporan Toni dan Syaputri (2020, h. 37) yang menunjukkan bahwa media massa konvensional dan media daring justru menjadi arena pusat konflik.

Diskusi peranan media daring dalam penyelesaian konflik SDA melibatkan konsep dan teori, yaitu media daring dan konflik SDA, serta jurnalisme damai. Menurut Mahyudin (2019, h. 33-37), media daring adalah saluran komunikasi yang dilakukan secara daring berbasis telekomunikasi melalui situs web di internet. Media daring memungkinkan berita dapat diakses oleh siapa saja dan di mana saja tanpa dibatasi wilayah tertentu asalkan terhubung dengan internet. Selain itu laporan berita bisa dilengkapi foto-foto dan video. Media pun memiliki peluang untuk memperbaikinya setiap saat. Mubaraq (2020, h. 30) menyatakan bahwa media daring mudah diakses, bersifat *real-time*, interaktif, dan terdapat berbagai unsur multimedia serta berita yang bisa diperbaiki kapan pun.

Karakteristik media daring memungkinkan media mengambil peran sebagai saluran resolusi konflik (Santoso, 2017, h. 210). Selaras dengan pendapat tersebut, Nandang (2021, h. 17) mengemukakan bahwa berita konflik yang dipublikasikan di media massa bertujuan untuk menciptakan kesadaran publik. Kesadaran itulah yang menjadi pintu penyelesain konflik yang lebih masif. Sebagaimana pengalaman Perkumpulan *Scale Up* yang menunjukkan bahwa konflik yang bisa diselesaikan adalah konflik yang

sudah diberitakan di media massa (Amady, 2022, h. 14). Media massa, khususnya media daring, dituntut proporsional dalam memberitakan konflik SDA, sehingga konflik tidak bertambah tajam atau bahkan dapat mereduksi konflik tersebut.

Konflik SDA memiliki karakteristik yang berbeda dengan konflik sosial lainnya. Konflik tersebut melibatkan para pemangku kepentingan, yaitu pemilik modal dan petani pemilik lahan dengan luas terbatas di pedesaan. Menurut Afrizal (2021, h. 60-61), konflik SDA adalah pertentangan kepentingan antara dua pihak atas penguasaan dan pengontrolan SDA. Pihak pertama (pemilik modal) memaksakan kepentingannya kepada pihak lain, sedangkan pihak lawan (petani pedesaan) tidak bersedia jika kepentingannya dikontrol. Tarik-menarik kepentingan ini memungkinkan terjadi tindak kekerasan. Kekerasan merupakan instrumen untuk memaksakan kehendak. Kekerasan dalam konflik adalah puncak eskalasi pertentangan dua pihak tersebut.

Kehadiran jurnalisme damai dalam pemberitaan konflik, terutama konflik SDA, penting dipraktikkan sebab dapat mendorong penyelesaian konflik yang egaliter. McGoldrick dan Lynch (2001, h. 8) mengungkapkan bahwa jurnalisme damai berperan aktif memengaruhi sumber berita dan pembacanya untuk segera menghentikan konflik. Lynch (2015, h. 193) mengungkapkan bahwa jurnalisme damai merupakan kebijakan para editor untuk menentukan pilihan berita dan cara menyampaikannya. Hal ini bertujuan

memberi peluang bagi masyarakat pembaca agar memilih jalan tanpa kekerasan dalam berhadapan dengan konflik. Jurnalisme damai harus berorientasi pada perdamaian, masyarakat, kebenaran, dan solusi.

Peranan media daring dalam menyikapi konflik, menurut Nandang (2021, h. 17), yaitu: pertama, media sebagai *issue intensifier*, memunculkan konflik kemudian mempertajamnya. Pada posisi ini, media memperbesar realitas menjadi isu, sehingga seluruh dimensi konflik menjadi transparan. Kedua, media sebagai *conflict diminisher*, yakni menenggelamkan suatu isu atau konflik, terutama bila menyangkut kepentingan media bersangkutan. Media dikonstruksi sedemikian rupa menjadi alat ekonomi dan ideologis. Ketiga, media berfungsi sebagai pengarah konflik (*conflict resolution*), yakni menjadi mediator dengan menampilkan isu dari berbagai perspektif serta mengarahkan pihak yang bertikai pada penyelesaian konflik. Pihak yang terlibat diharapkan memahami sudut pandang pihak lain, mengatasi prasangka dan kecurigaan, serta mengevaluasi ulang sikap apriori yang terbentuk. Studi ini menelusuri tiga pilihan posisi media daring di Riau terhadap konflik.

Berita di media daring seharusnya berbasis fakta yang sesungguhnya yang tidak terdistorsi oleh kepentingan pemilik media dan segelintir orang, sehingga berita tersebut menjadi ruang netral (Wahid & Pratomo, 2017, h. 187). Ruang netral tersebut, langsung maupun tidak, sulit diwujudkan karena realitas sosial selalu dikonstruksi oleh editor, baik atas alasan

teknis, ekonomi, maupun ideologis. Bahkan kebijakan media dalam memilih sumber berita saja secara tidak langsung merupakan bagian dari konstruksi realitas sosial. Pemberitaan media daring terkait konflik SDA menjadi pedang bermata dua. Pada satu sisi bisa membantu meredakan konflik, namun di sisi lain berpotensi memperluas eskalasi konflik dan mengambil keuntungan dari pemberitaan konflik. Media sudah sepatutnya mempraktikkan jurnalisme damai untuk meredakan konflik.

Posisi jurnalisme damai ini penting diambil oleh media daring guna menghindari berita yang ditumpangi kepentingan ekonomi, politik, dan ideologi (Wahid & Pratomo, 2017, h. xi). Jurnalisme damai menempatkan fakta sosial secara benar untuk menghindari pemberitaan atas tujuan menjual realitas sosial berdasarkan nilai berita laku atau tidak laku, mencari sensasi, dan hanya menampilkan aktor-aktor konflik serta korban konflik saja. McGoldrick dan Lynch (2001, h. 6) memaparkan bahwa jurnalisme damai mewajibkan jurnalis menulis berita dengan tujuan perdamaian dan mengakhiri konflik secara adil dan egaliter. Peran redaksi menjadi sangat penting dalam mewujudkan jurnalisme damai karena berita merupakan cerminan dari kebijakan redaksional yang tertuang dalam struktur pesan yang disampaikan melalui berita.

Pembahasan tentang posisi media daring di Riau terhadap konflik di Riau ini menggunakan teori ekonomi politik media. Rosana (2011, h. 132) menjelaskan bahwa teori ekonomi politik media memfokuskan

kajian pada hubungan antara struktur ekonomi, dinamika industri media, dan ideologi media. Media massa tidak lebih dari satu bagian dalam sistem ekonomi yang juga sangat dekat pada sistem politik. Teori ini menjelaskan bahwa pasar dan ideologi memiliki pengaruh besar pada penentuan isi media. Perbedaan isi media antara satu dengan yang lainnya bergantung pada kepemilikan dan modal yang dimiliki. Secara sempit ekonomi politik melibatkan hubungan kekuasaan yang saling menguntungkan antara sumber produksi, distribusi, dan konsumsi yang terkait dengan komunikasi melalui media, di mana media sebagai institusi ekonomi dan institusi politik yang memengaruhi masyarakat.

Pendapat di atas diperkuat oleh Freedman (dalam Nuswantoro, 2013, h. 50) bahwa sistem media dibentuk oleh pemilik media dengan tujuan ekonomi politik tertentu, dengan nuansa-nuansa teknologi, ekonomi, dan sosial di dalamnya. Dengan demikian, pemilik media memang memiliki kepentingan ekonomi dan politik dari media yang dimilikinya. Selanjutnya Nuswantoro (2013, h. 50) menjelaskan bahwa institusi media memiliki kepentingan untuk masuk ke ruang redaksi dan memengaruhi berita. Sering sekali intervensi pemilik media mengabaikan prinsip-prinsip objektivitas dan profesionalisme wartawan.

Sucahya (2013, h. 16) menyampaikan bahwa ekonomi politik media merupakan permasalahan modal para investor. Bukan hanya modal untuk membangun industri media, tetapi para pemilik modal dari

semua sektor bisnis menjadikan media sebagai alat untuk mendapat keuntungan, baik keuntungan finansial secara langsung maupun penguasaan sumber daya tertentu melalui kekuatan politik dan sosial. Baran, sebagaimana dikutip Sucahya (2013, h. 17), menunjukkan bahwa titik berat ekonomi politik media ada pada pengendalian proses produksi dan distribusi konten. Media menghasilkan berita yang baru dan menarik, sehingga menjadi perhatian khalayak ramai yang akan mendatangkan iklan.

Ekonomi politik media pada konflik SDA merujuk kepada kepentingan pemodal yang berkonflik dengan masyarakat, pemilik media dan aktor politik. Pemodal yang bergerak di industri sawit dan hutan tanaman industri (HTI) memiliki kepentingan agar media meredam tersiarnya berita konflik SDA di masyarakat. Beberapa upaya dilakukan untuk meredam atau justru merubah fakta menjadi sesuai dengan keinginan pemodal. Pemodal yang bergerak pada sektor industri perkebunan sawit dan hutan industri menyogok oknum pemilik media bahkan oknum wartawan dengan mengelontor sejumlah uang dan memasang iklan di media-media tersebut (Amady, 2022, h 9). Penguasaan media melalui gelontoran uang dan iklan tersebut membuat pemberitaan konflik menjadi berkurang, bahkan media hanya sekali memberitakan konflik tersebut atau justru mengkonstruksi masyarakat sebagai biang kerok penyebab konflik. Sebaliknya, beberapa oknum pemilik media dan oknum wartawan menjadikan berita konflik sebagai alat negosiasi untuk mendapatkan

keuntungan ekonomi dengan cara ancaman akan diberitakan.

Hubungan media, khususnya media daring saat meliput konflik SDA dan memiliki kedekatan dengan pemodal memiliki hubungan yang bersifat mutualisme fungsional. Pihak pemodal berkepentingan untuk meredam pemberitaan konflik, di lain pihak oknum wartawan membutuhkan pemodal untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Begitu juga hubungan mutualisme fungsional antara oknum pemilik media dan oknum wartawan dengan politisi dan pejabat negara yang memerlukan pencitraan sebagai pembela masyarakat yang menjadi korban konflik SDA.

Studi tentang posisi media dalam konflik SDA, khususnya media daring belum dijumpai di jurnal-jurnal di Indonesia, sebab itu subjek studi ini merupakan subjek kajian baru yang diharapkan ikut berkontribusi bagi ilmu komunikasi khususnya peran media massa terhadap konflik SDA dan konflik-konflik lain. Studi-studi tentang konflik di Indonesia yang melibatkan media massa umumnya membahas konflik sosial dan pemberitaan dengan pendekatan framing media. Misalnya, Faujiah dan Rubiyannah (2020, h. 72-80) yang membahas mengenai pbingkaihan berita terkait konflik agraria di Kulon Progo. Begitu juga tulisan Nandang (2021, h. 15) juga membahas peranan media dalam penyelesaian konflik, namun yang menjadi fokus kajiannya adalah konflik sosial. Tiga penelitian di atas membahas mengenai aspek sosial

dari sebuah konflik, sedangkan tulisan ini membahas konflik SDA di Riau. Oleh karena itu, studi ini merupakan studi yang relatif baru karena penulis topik ini masih sangat terbatas.

Tulisan ini membahas peran media massa sebagai *conflict diminisher* atau menenggelamkan isu konflik, yaitu media massa secara sengaja meniadakan berita konflik untuk kepentingan pemilik media, ideologis, dan kapitalis. Media daring belum bertindak sebagai aktor resolusi konflik, sehingga isu konflik belum dianggap sebagai isu penting dalam upaya resolusi konflik SDA. Media belum hadir sebagai pendorong bagi pihak pemerintah, perusahaan dan masyarakat untuk menyelesaikan konflik secara adil dan egaliter, sehingga isu konflik belum masuk ke ranah kebijakan. Pembahasan terkait isu konflik SDA ini didekati melalui teori ekonomi politik media, sehingga bisa mengenali pola relasi antaraktor dalam mengonstruksi berita konflik untuk penguasaan sumber daya ekonomi.

Dalam upaya mendiskusikan data dengan teori, studi ini mengoperasionalkan kepentingan pemilik media melalui dua hal. Pertama, ruang pemberitaan konflik di masing-masing media daring yang tergambar dari keberlanjutan dari setiap berita konflik. Pemberitaan yang tidak berkelanjutan pada satu media daring dapat dikonstruksikan bahwa media tersebut memanfaatkan konflik untuk kepentingan pemilik media, apalagi kemudian dijumpai iklan pihak perusahaan di media tersebut. Kedua, sumber berita, pesan yang

disampaikan di berita, aktor yang tampil di media dan foto yang ditampilkan. Pendekatan analisis ini dimaksudkan untuk memahami media berpihak kepada siapa.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berbasis dokumentasi dari berita-berita media massa daring dan media cetak yang terbit di Riau. Murdiyanto, (2020, h. 19) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif dan melakukan analisis dengan pendekatan induktif. Penelitian kualitatif berbasis dokumentasi merupakan metode penelitian yang menelusuri data historis melalui pengumpulan dokumen (Nilamsari, 2014, h. 178). Pada penelitian ini, dokumen yang digunakan adalah dokumen berita terkait konflik SDA di Riau. Media massa daring yang menjadi sumber data adalah semua media daring di Riau yang memberitakan konflik SDA dan *Harian Tribun Pekanbaru* sebagai pembanding dari media cetak yang terbit di Riau dari tahun 2016-2018. Pemilihan periode tersebut karena sejak tahun 2015 pemerintah sudah menjadikan konflik SDA sebagian dari tugas di beberapa kementerian, terutama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pertanian khususnya sektor Perkebunan dan Kepolisian. Antara tahun 2016-2018 penanganan konflik SDA sudah menjadi prioritas dan tugas dari pejabatan negara.

Pada media daring di Riau dan *Harian Tribun Pekanbaru*, berita dianalisis untuk

mendapatkan data terkait jumlah konflik yang diberitakan, sektor konflik, dan berita lanjutan terkait konflik SDA. Unit pembahasan penelitian ini adalah 186 berita yang disiarkan oleh 99 media daring dari 323 media daring di Riau dan 132 berita yang disiarkan oleh media cetak *Harian Tribun Pekanbaru* sebagai pembanding media daring. Berita media tersebut dianalisis menggunakan analisis isi dan dilihat kecenderungan media memberitakan konflik SDA dari tahun 2016-2018.

Berita-berita konflik SDA yang diterbitkan oleh media daring di Riau didokumentasikan, kemudian ditabulasi berdasarkan media daring dan pemberitaan konflik yang sama. Variabel yang ditabulasi adalah sumber berita, judul berita, pesan yang disampaikan dalam berita tersebut, hubungan berita dengan informasi konflik sebelum dan foto yang ditampilkan, begitu juga kecenderungan pemberitaan sejak tahun 2016-2018. Sebagai pembanding dari media daring, peneliti melakukan analisis isi pada media cetak yaitu *Harian Tribun Pekanbaru* pada tahun 2016-2018 serta kecenderungan pemberitaan 2016-2018. Berita di *Harian Tribun Pekanbaru* juga ditabulasi dengan unit analisis yang sama dengan media daring. Langkah selanjutnya data dikelompokkan menjadi dua yaitu data media daring dan data dari media cetak dalam satu tabel sesuai dengan variabel yang ditampilkan.

Tahap lanjutan dari penelitian adalah melakukan triangulasi dengan wawancara kepada narasumber yang memiliki kredibilitas pada sebuah isu tertentu

(Helaluddin & Wijaya, 2019, h. 22). Penulis melakukan wawancara dengan wartawan senior *Kompas*, Syahnan Rangkuti untuk berpendapat mengenai media daring dan cara kerjanya. Penulis sudah mencoba menghubungi beberapa wartawan dari media daring lokal Riau tetapi tidak ada yang bersedia mengemukakan pendapatnya dan hanya Syahnan Rangkuti yang bersedia diwawancarai.

Setelah mengumpulkan data dari media daring dan wawancara, data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, kemudian peneliti mengonstruksi data yang sudah ditabulasi berdasarkan pesan berita yang disampaikan. Pesan tersebut dilihat melalui pilihan narasumber, isi berita, judul, dan foto yang ditampilkan. Pesan yang disampaikan pada berita tersebut diperoleh melalui dialog antara temuan data dengan teori ekonomi politik. Hasil dari analisis deskriptif menggunakan teori ekonomi politik media tersebut dilaporkan pada tulisan ini.

HASIL

Konflik SDA di Riau 2016-2018

Laporan tahunan *Scale Up* tentang konflik lahan selama periode 2016-2018 di Riau menggambarkan intensitas konflik ke dalam tiga variabel, yaitu jumlah konflik, karakteristik konflik yang terjadi di sektor

kehutanan dan perkebunan di masing-masing kabupaten/kota, dan luas area konflik SDA, termasuk jumlah konflik yang sudah dan belum ditangani oleh pemerintah (Amady, 2022). Data tersebut disajikan dalam bentuk angka-angka untuk melihat tren arah konflik dan penanganannya di masing-masing pemerintah kabupaten/kota. Jumlah konflik yang terjadi di Riau antara tahun 2016-2018 berjumlah 186 konflik SDA seperti diuraikan pada tabel 1:

Pada tabel 1 ditampilkan dua jenis konflik yaitu konflik lama dan konflik baru. Konflik lama adalah konflik yang sudah pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Konflik lama tersebut muncul kembali 12 kasus di tahun 2017 dan 13 kasus di tahun 2018. Sedangkan konflik baru adalah konflik yang baru pertama kali diberitakan pada tahun 2016-2018. Data tersebut juga menggambarkan bahwa konflik yang sudah pernah terjadi belum diselesaikan dan muncul pada tahun-tahun berikutnya. Konflik baru yang muncul eskalasinya di media daring pada tahun 2016-2018, yaitu 64 kasus konflik baru pada tahun 2017 dan 26 kasus baru pada tahun 2018. Data tersebut menjelaskan bahwa pada tahun 2017 terjadi 76 kasus, di mana terdapat 12 kasus konflik lama yang muncul kembali di tahun 2017, dan 64 kasus baru yang baru pertama kali

Tabel 1 Jumlah Konflik di Riau (2016-2018)

Jenis Konflik	Tahun		
	2016	2017	2018
Konflik Lama	data tidak tersedia	12	13
Konflik Baru	71	64	26
Total	71	76	39

Sumber: Amady (2021, h. 84)

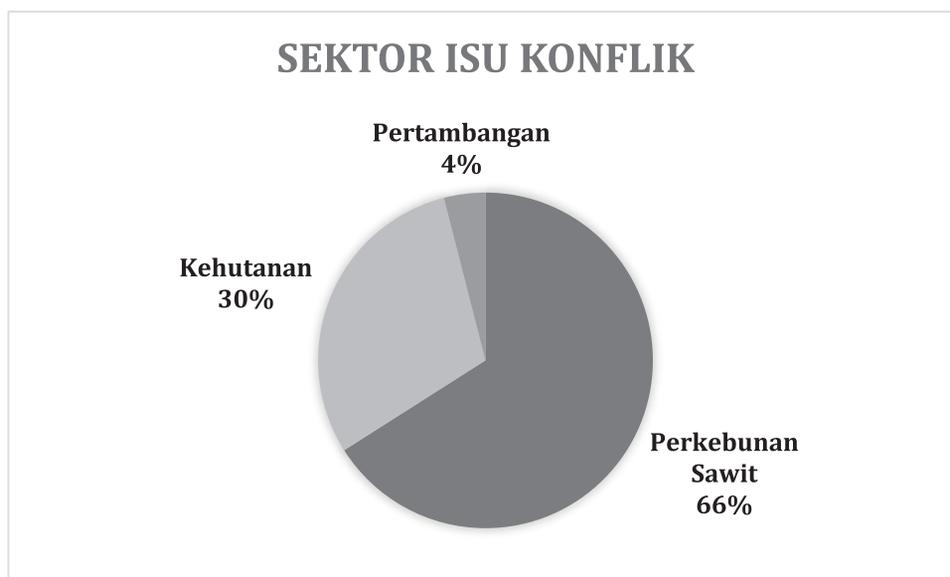
diberitakan di media daring. Begitu juga di tahun 2018, terdapat 13 konflik lama yang terjadi lagi di tahun 2018, dan 26 konflik baru yang muncul di tahun 2018.

Tabel 1 juga menjelaskan bahwa dalam tiga tahun terjadi kenaikan jumlah berita konflik dari tahun 2016 ke 2017 kemudian terjadi penurunan berita konflik di tahun 2018. Pada tahun 2017 dan 2018 lagi pada pemberitaan media massa. Meskipun jumlah kasus tahun 2017 yang tidak kembali diberitakan mencapai 37 kasus konflik di tahun 2018. Jumlah konflik lama yang muncul merupakan konflik yang terjadi sejak tahun 2003. Konflik yang selesai atau dalam proses penyelesaian dari tahun 2016, 2017, dan 2018 belum diketahui informasinya. Jumlah kasus tersebut terjadi di 62 desa pada tahun 2016, 20 desa tahun 2017, dan 43 desa pada tahun 2018 dari 1.846 desa dan kelurahan di provinsi Riau.

Berdasarkan data konflik SDA di Riau, konflik tertinggi terjadi di kabupaten

Pelalawan dengan jumlah 40 kasus, diikuti kabupaten Siak 32 kasus, serta kabupaten Kampar dan Rohil masing-masing 20 kasus. Sementara urutan kelima adalah kabupaten Inhu dengan jumlah 18 kasus. Jumlah konflik di atas memiliki korelasi kuat antara luas kawasan hutan dan beroperasinya perusahaan perkebunan sawit skala besar di kabupaten tersebut. Sektor atau isu konflik dapat diketahui melalui grafik 1.

Grafik 1 menunjukkan sebaran sektor konflik SDA yang terjadi di Riau. Konflik paling banyak terjadi pada sektor perkebunan sawit yakni sebesar 66 persen, konflik kehutanan 30 persen, dan konflik tambang 4 persen. Karakteristik konflik di sektor kehutanan disebabkan oleh eskalasi konflik sengketa lahan antara masyarakat, negara, dan perusahaan. Data *Scale Up* (Amady, 2022, h. 16) menunjukkan bahwa konflik ini disebabkan oleh beberapa variabel, yaitu tumpang tindih perizinan (24 Kasus), tanah ulayat (2 Kasus), akses



Gambar 1 Sektor atau Isu Konflik

Sumber: Amady (2021, h. 85)

kelola (6 kasus), ganti rugi (1 kasus), alih fungsi (4 kasus), tapal batas (1), okupasi (3), dan tidak ada keterangan (21 kasus).

Konflik terkait SDA di Riau juga terjadi pada sektor perkebunan, namun kasusnya memiliki dimensi yang berbeda dibanding permasalahan sektor kehutanan. Faktor-faktor yang menjadi penyebab konflik perkebunan yang teridentifikasi yaitu: izin bermasalah (7 kasus), penyerobotan lahan (13 kasus), koperasi kredit primer anggota/ KKPA (7 Kasus), perambahan hutan (11 kasus), pencemaran lingkungan (9 kasus), tumpang tindih 10 (kasus), ganti rugi (2 kasus), tenaga kerja (1 kasus), tanah ulayat (1 kasus) (Amady, 2022, h. 16).

Dampak konflik SDA ini besar pengaruhnya terhadap kehidupan sosial. Hal ini tergambar dari luasan konflik yang terjadi di Riau. Gambaran ini diperlukan untuk mempertegas kondisi konflik SDA yang terjadi di Riau. Oleh karena itu, kehadiran media untuk menyelesaikan konflik SDA sangat penting. Sebaliknya jika kehadiran media justru menenggelamkan berita konflik, maka organisasi profesi wartawan dan organisasi perusahaan media

harus segera mengkaji ulang keberadaaan media tersebut.

Media Daring Memberitakan Konflik

Media daring di Riau, sebagai sebuah saluran informasi sudah seharusnya meliput dan mengawal isu konflik SDA di Riau. Hasil data penelitian ini menunjukkan fakta sebaliknya. Data menunjukkan bahwa terdapat 224 media tidak meliput dan memberitakan konflik SDA, terdapat 323 berita yang terbit satu kali di 65 media daring, 34 media yang memberitakan lebih dari satu kali, dan hanya 6 media daring yang memberitakan lebih dari 10 kali berita konflik dari 186 kasus konflik SDA yang terjadi di Riau pada kurun waktu 2016-2018. Data ini dapat diinterpretasikan bahwa jumlah media yang mengambil perhatian terhadap konflik hanya 1,9 persen saja melalui praktik pemberitaan konflik berulang hingga 10 kali atau lebih. Media-media tersebut umumnya adalah anak perusahaan dari media cetak dan media pemilik modal besar. Media-media yang masih memberitakan konflik SDA selama 3 tahun berturut-turut dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2 Jumlah Pemberitaan Konflik SDA di Media Daring (2016-2018)

No	Situs Berita	Tahun Pemberitaan			Total Pemberitaan
		2016	2017	2018	
1	RiauTerkini.com	11	8	5	24
2	GoRiau.com	9	6	4	19
3	Riau Mandiri.com	10	1	4	15
4	Gagasan Riau.com	4	4	4	12
5	Tribun Pekanbaru.com	1	3	6	10
7	Riau Online.com	2	5	2	9
8	Riau Editor.com	6	1	1	8
9	Riau24.com	3	1	2	6

Sumber: Olahan Peneliti (2021)

Syahnan Rangkuti (wartawan senior *Kompas*) menyampaikan bahwa di Riau terdapat 323 media daring dan dapat dikategorikan menjadi tiga. Pertama, media daring yang merupakan anak perusahaan dari media cetak lokal yang terbit di Riau. Kedua, media yang dimiliki oleh pemodal besar di Riau. Ketiga, media yang pemiliknya dianggap tidak memiliki modal, alias modal nekat, yang kadang satu orang memiliki lebih dari 4 media. Ketiga kategori tersebut juga memiliki profesionalisme yang berbeda, kategori pertama yang jumlahnya hanya 4 media dengan tingkat profesionalitas lumayan terjamin, kategori kedua profesionalitas agak baik, sedangkan kategori ketiga dengan profesionalitas yang sangat jelek. Ringkasnya, ketiga kategori tersebut sangat dekat dengan tingkat profesionalitas. Kategori satu dan dua lebih profesional, sedangkan kategori ketiga belum profesional (Syahnan Rangkuti, wartawan senior *Kompas*, wawancara, 24 April 2019).

Gambaran kategori dari Syahnan Rangkuti tersebut dengan pemberitaan media daring tentang konflik SDA jelas sekali, yaitu dari 323 media daring terdapat 99 media atau 30,6 persen yang memberitakan tentang konflik dan 69,4 persen tidak pernah memberitakan konflik sama sekali selama tiga tahun. Sejumlah 99 media daring tersebut menghasilkan 256 berita atau rata-rata satu media memberitakan kurang dari 3 berita. Sejumlah 256 berita tersebut merupakan pemberitaan dari 186 konflik yang terdiri atas 25 konflik berulang dan 161 konflik

baru. Hanya 23 berita atau 9% dari berita tersebut merupakan kelanjutan berita sebelumnya, atau 91% berita merupakan berita baru atau pertama kali diberitakan. Rata-rata secara keseluruhan dari total 323 media hanya memberitakan 1,4 berita per media per tahun. Sedangkan rata-rata dari 99 media daring yang memberitakan konflik adalah 2,6 berita setiap media daring selama 2016-2018.

Data penelitian menunjukkan bahwa terdapat 65 atau 66 persen media daring hanya satu kali memberitakan berita konflik selama tiga tahun. Terdapat 9 media daring atau 0,9 persen memberitakan konflik rata-rata 5 kali dalam tiga tahun. Hanya 6 media daring yang memberitakan konflik sebanyak 10 kali dalam 3 tahun, 5 di antaranya merupakan anak perusahaan media cetak, 1 merupakan media daring milik perorangan di Riau. Media daring yang memberitakan lebih 10 kali berita konflik masuk dalam kategori pertama dan kedua dari kategori yang disampaikan Syahnan Rangkuti di atas.

Data lain dari penelitian ini menunjukkan berita-berita di media daring menaikkan opini bahwa masyarakat merupakan aktor konflik yang berperan menaikkan eskalasi konflik. Perusahaan dipandang sebagai sumber konflik dengan masyarakat, sedangkan politisi dan pemerintah tampil berpihak kepada masyarakat dalam penyelesaian konflik. Sementara itu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yaitu Perkumpulan *Scale Up*, Jikalauhari, JMGR, Walhi, HMI, LBH, dan Topan Riau menjadi pendamping

masyarakat. Total opini dari empat sumber berita tersebut adalah 391 sumber, 17 opini dari perusahaan yang menggambarkan jumlah perusahaan berkonflik, 40 opini dari politisi yang mengambil kesempatan untuk dukungan politik, 32 opini dari pemerintah, dan 7 opini dari LSM.

Selain itu, terdapat 227 tampilan foto, yaitu 93 foto berisi aksi demo mendatangi dinas terkait, 26 foto pejabat yang meliputi presiden, DPD RI, Gubernur, Bupati, Walikota, anggota DPRD Kabupaten, Camat, Polsek, Satpol PP, Pengadilan dan Kepala Desa, dan 8 foto tentang perusahaan yang meliputi aktivitas produksi perusahaan, pengamanan wilayah perusahaan dan logo perusahaan. Sejumlah 11 foto polisi sedang mengawal aksi demo, menjaga bentrok, dan garis polisi. Sejumlah 50 foto menggambarkan plang perusahaan, korban pembunuhan, rumah terbakar, hamparan lahan, dan tugu tapal batas. Sejumlah 39 foto resolusi konflik menggambarkan kegiatan dengar pendapat, proses negosiasi dan mediasi, persidangan, tim pencari fakta, pengacara, peninjauan lapangan, dan pemeriksaan dokumen. Foto dan opini berita tersebut makin tegas tampak dari judul-judul berita yang ditampilkan.

Data pada tabel 3 menunjukkan adanya opini besar yang ditampilkan melalui 105

judul berita yang memosisikan perusahaan yang salah, 6 judul berita yang memosisikan masyarakat yang salah, 23 judul berita yang menganjurkan resolusi, 2 berita yang menggambarkan konflik memanas, 2 berita tentang keterlibatan LSM, 12 berita menurut keterlibatan pemerintah, 4 berita DPRD mendesak pemerintah untuk menyelesaikan konflik, 28 berita berisi tugas legislatif dalam menyelesaikan konflik, dan 74 judul lainnya berisi hal-hal lain yang bersifat personal, objek konflik, dan lainnya.

PEMBAHASAN

Berdasarkan data pemberitaan media di atas diketahui bahwa terjadi penurunan jumlah media yang memberitakan konflik SDA. Pada tahun 2016 terdapat 70 media daring yang memberitakan konflik SDA, tahun 2017 terdapat 42 media, dan pada tahun 2018 hanya 13 media. Bahkan 53 media yang memberitakan di tahun 2016, pada tahun 2017 dan 2018 tidak memberitakan sama sekali. Penurunan jumlah media tersebut juga mengakibatkan penurunan pemberitaan yang signifikan, yaitu tahun 2016 terdapat 146 berita, tahun 2017 terdapat 77 berita, dan di tahun 2018 terdapat 33 berita saja. Terdapat 62 media daring yang hanya sekali saja memberitakan konflik selama tiga tahun berturut-turut dan 16 media hanya dua kali memberitakan

Tabel 3 Tampilan Isi Berita tentang Konflik di Media Daring (2016-2018)

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Sumber Berita	391	Masyarakat, Pemerintah, Politisi, Perusahaan, dan LSM
2	Opini yang Disampaikan	96	Asas legalitas, tudingan ke masyarakat, tudingan ke perusahaan, dan upaya resolusi
3	Jumlah Foto yang Ditampilkan	227	Pejabat pemerintah, masyarakat aksi, perusahaan, kepolisian, resolusi, dan lain-lain

Sumber: Olahan Peneliti (2021)

konflik selama tiga tahun berturut-turut, dan berita konflik yang ditindaklanjuti hanya 23 berita dari 99 media dari 256 berita konflik.

Studi ini menemukan bahwa hanya terdapat 8 dari 323 media daring yang secara rutin memberitakan isu konflik SDA pada rentang tahun 2016-2018. Pada 8 media ini, jumlah berita konflik SDA makin berkurang setiap tahunnya dari tahun 2016 hingga tahun 2018 (tabel 2). Hal yang berbeda dapat dilihat pada media daring *Tribun Pekanbaru* yang dari tahun ke tahun jumlah berita konflik SDA-nya meningkat.

Penurunan jumlah berita konflik SDA diduga karena adanya campur tangan pemodal dan pengiklan pada redaksional media. Jika demikian, maka media sebagai corong para pihak yang menghindari penyiaran berita sesuai dengan realitas yang terjadi. Dampak yang paling mungkin terjadi pada media adalah terganggunya kondisi ekonomi politik media baik langsung maupun melalui iklan. Maka sangat wajar dijumpai bahwa berita konflik hanya sekali saja diberitakan dan tidak ada tindak lanjut karena adanya campur tangan pemodal. Media daring secara sengaja meniadakan isu konflik tersebut terutama menyangkut kepemilikan media dan ideologi media.

Temuan penelitian ini mempertegas dugaan penelitian bahwa media daring di Riau memilih peran sebagai *conflict diminisher* (menenggelamkan isu konflik) bahkan secara sengaja meniadakan isu konflik untuk kepentingan oknum aktor pemilik media dan melindungi

pemodal (Nandang, 2021, h.17). Aktor utama *conflict diminisher* adalah media daring dengan modal minim dan belum profesional. Media daring yang bertindak menenggelamkan isu konflik berjumlah 91 dari 99 media daring. Ini bukan berarti 9 media daring yang tetap memberitakan konflik SDA sepenuhnya mendorong resolusi konflik yang adil dan egaliter.

Conflict diminisher bersumber dari empat skenario. Pertama, media yang memberitakan konflik SDA lalu berkomunikasi dengan pihak pemodal. Pihak media tetap memberitakan konflik tersebut, namun beritanya dibingkai untuk kepentingan pemodal. Media pun mendapat keuntungan ekonomi melalui iklan. Kedua, media memberitakan konflik, lalu pemilik modal berkomunikasi ke pemilik media untuk tidak memberitakan konflik SDA lagi. Skenario ini terutama diwakili oleh 89,9 media yaitu hanya memberitakan satu kali saja. Jika media daring memberitakan lebih dari satu berita dalam tiga tahun, maka berita tersebut merupakan berita konflik baru dengan subjek dan objek pelaku yang berbeda.

Ketiga, politisi dan pejabat publik muncul di hadapan yang berkonflik dengan melibatkan media untuk tampil dalam berita yang sudah dikonstruksi sebagai keberpihakan kepada masyarakat untuk kepentingan politik. Keempat, kehadiran *broker* yang secara aktif mencari informasi ke masyarakat tentang isu konflik, kemudian informasi tersebut diteruskan kepada para pemodal ataupun pemerintah untuk mendapatkan imbalan.

Broker merupakan individu yang mengatasnamakan dirinya ataupun institusi media dan LSM untuk kepentingan pribadi. Selain itu, pola umumnya adalah melalui medium pengiklanan untuk peningkatan penjualan dan memperkuat struktur ekonomi dan politik para pihak. Media tempat pemilik modal beriklan mengurangi sensitivitas terhadap isu konflik bahkan tidak memberitakannya.

Opini yang dimunculkan oleh masing-masing pihak di atas menampilkan empat aktor utama dalam pemberitaan. Pertama, perusahaan yang mengeksploitasi SDA pada kasus di Riau terutama perkebunan sawit, hutan tanaman industri, dan perusahaan tambang. Kepentingan perusahaan terhadap media massa termasuk media daring adalah untuk keberlanjutan produksi dan distribusi. Pemberitaan tentang konflik SDA di media massa berdampak buruk terhadap penjualan produknya di luar negeri. Kedua, pemerintah desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pusat yang berkepentingan terhadap legitimasi kekuasaan. Pemerintah memengaruhi media untuk mendapat dukungan politik dari masyarakat dan perusahaan. Ketiga, aktor-aktor politik, terutama dari anggota legislatif dan anggota partai sebagai legitimasi partisipasi. Para politisi dari DPR, DPD, DPRD dan pengurus partai menjadikan konflik SDA sebagai jalan mendapatkan pencitraan positif demi mendapat dukungan suara dari masyarakat. Keempat, *broker* yang memanfaatkan media untuk kepentingan pribadi dari masyarakat, perusahaan, dan pemerintah. *Broker* ini ada yang bergerak

atas nama perorangan, media, dan bahkan ada yang atas nama LSM.

Selain empat aktor utama di atas, terdapat aktor korban, yaitu masyarakat yang berkonflik dengan perusahaan yang membutuhkan pemberitaan media massa agar kasus konfliknya menjadi isu di perusahaan, pemerintahan, dan masyarakat luas. Masyarakat akan lebih cepat mengakses media jika melibatkan aktor dari LSM. LSM bertindak sebagai sumber berita dan/atau yang menuliskan peristiwa lalu menyampaikannya ke media massa.

SIMPULAN

Studi ini menyimpulkan bahwa pemberitaan tentang konflik SDA oleh media daring di Riau secara teoritis dikonstruksi tidak cukup memadai karena mayoritas berita konflik SDA disiarkan hanya satu kali (diskontinu). Besarnya persentase media yang hanya sekali memberitakan selama 3 tahun dan terjadi penurunan berita konflik SDA di media daring menunjukkan adanya pembungkaman yang terjadi melalui campur tangan pemodal kepada media. Persoalan campur tangan pemodal ini menunjukkan pula adanya hubungan yang kuat antara kekuatan modal dengan profesionalisme media.

Delapan media yang memberitakan konflik SDA merupakan media daring yang berkonvergensi dengan media cetak dan pemilik modal. Sementara 90.9 persen media yang hanya sekali memberitakan konflik selama tiga tahun dikategorikan sebagai media daring yang minim modal. Minimnya modal ini seharusnya menjadi

evaluasi terkait syarat administratif dari pendirian media daring agar pada praktik berikutnya media daring mampu menjalankan proses bisnis serta prinsip jurnalisme dengan lebih baik.

Persoalan lainnya adalah terkait pasar yang menjadi agenda penting bagi dunia usaha saat membangun relasi dengan media. Sayangnya, relasi yang dibangun mendegradasi fungsi jurnalisme, sehingga membuka peluang konspirasi para pihak yaitu media, pemerintah, dan perusahaan. Agenda pasar perusahaan membuka peluang munculnya media-media daring yang dipelopori oleh aktor untuk mendapat keuntungan ekonomi.

Konflik SDA di Riau menjadi komoditas oleh berbagai pihak selama media belum melahirkan aturan-aturan dan nilai bagi media yang layak mendapat kesempatan sebagai media. Pihak perusahaan perlu memasukkan kategori-kategori media daring pada agenda pasar, sehingga terbentuk suasana kondusif bagi perkembangan media daring.

DAFTAR RUJUKAN

- Afrizal. (2021). Peran pemerintah daerah dalam resolusi konflik. Dalam MRE Amady (ed), *Praktik penyelesaian konflik di luar pengadilan* (h. 58-72). Boyolali, Indonesia: Penerbit Lakeisha.
- Amady, M. R. E. (2019). *Laporan tahunan riset media perkumpulan scale up*. Pekanbaru, Indonesia: Scale Up.
- (2021). *Membuka akses masyarakat desa dalam penyelesaian konflik: Laporan penelitian media tahunan perkumpulan scale up tahun 2021*. Pekanbaru, Indonesia: Scale Up.
- (2022). *Laporan riset media perkumpulan scale up, tahun 2021*. Pekanbaru, Indonesia: Scale Up.
- Anggoro, F. B. (2020). Konflik sumber daya alam di Riau naik 37 persen pada 2019. *www.antaraneews.com*. <<https://www.antaraneews.com/berita/1269269/konflik-sumber-daya-alam-di-riau-naik-37-persen-pada-2019>>
- Faujiah, N. A., & Rubiyannah. (2020). Analisis framing pemberitaan konflik agrarian Kulon Progo terkait pembangunan bandara YIA pada medcom.id dan tirto.id. *Jurnal Studi Jurnalistik*, 2(1), 72-80.
- Helaluddin, & Wijaya, H. (2019). *Analisis data kualitatif: Sebuah tinjauan teori & praktik*. Makassar, Indonesia: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Julham, M. (2018). Peran aktor dalam media massa terhadap konflik lahan kehutanan antara masyarakat dengan pemerintah di Maluku Utara. *Jurnal Agribisnis Perikanan*, 11(1), 53-60.
- Kleinschmit, D. (2012). Confronting the demands of a deliberative public sphere with media constraints. *Forest Policy and Economics*, 16, 71-80.
- Komala, R. (2017). Mendorong profesionalisme pers melalui verifikasi perusahaan pers. *Jurnal Dewan Pers*, 14 (Juni 2017), 7-10.
- Lynch, J. (2015). Peace journalism: Theoretical and methodological development, *Journal Global Media Communication*, 11(3), 193-199.
- Mahyudin. (2019). *Sosiologi komunikasi: Dinamika relasi spasial di dalam era virtualitas*. Makassar, Indonesia: CV Shofia.
- McGoldrik, A., & Lynch, J. (2001). What is peace journalism? *Activate, Winter 2001*, 6-9.
- Mubaraq, D. F. (2020). *Analisis teks media sebuah pengantar riset jurnalistik*. Pare-Pare, Indonesia: IAIN Parepare Nusantara Press.
- Murdiyanto, E. (2020). *Metode penelitian kualitatif: Teori dan aplikasi disertai contoh proposal*. Yogyakarta, Indonesia: Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press.

- Nandang, H. M. Z. (2021). Media dalam penyelesaian konflik sosial. *HIKMAH Jurnal Dakwah & Sosial*, 1(1), 15-21.
- Nilamsari, N. (2014). Memahami studi dokumen dalam penelitian kualitatif. *Wacana*, XIII(2), 177-181.
- Nuswantoro, A. R. (2013). Media massa dalam situasi konflik: Dari bandwagon effect sampai peace narrative, *Jurnal Aspikom*, 1(6), 203-216.
- Rosana, A. S. (2011). Konflik kepentingan di media televisi Indonesia. *Gema Eksos*, 6(2), 127-143.
- Santoso, B. A. (2017). Peran media dalam mencegah konflik sosial. *Jurnal ASPIKOM*, 3(2), 199-214.
- Sari, S. T. N., Widyaningyun, D. N., & Widiyarta, A. (2021). Peran media digital cakrajatim.com sebagai fungsi kontrol sosial di kabupaten Sidoarjo. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 10(2), 136-142.
- Sucahya, M. (2013). Ruang publik dan ekonomi politik media. *Jurnal Komunikasi*, 2(2), 15-22.
- Toni, H., & Syaputri, I. K. (2020). Peace journalism not alive? (menganalisis peran media terhadap pemberitaan peace journalism pada konflik PT. Freeport di Papua). *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 5(1), 30-48.
- Wahid, A., & Pratomo, D. A. (2017). *Masyarakat dan teks media (membangun nalar kritis masyarakat pada teks media)*. Malang, Indonesia: UBPress.